PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025-2029



DINAS PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2025-2029sesuai dengan urusan yang dibidangi, yaitu urusan komunikasi dan Informatika, urusan statistik dan urusan persandian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Perhubungan menggambarkan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Solok, yaitu **"Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera"**, serta diperkuat dengan Misi ke-4 *"Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari"*.

Selain itu, Renstra Dinas Perhubungan diselaraskan dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2025-2029;
2. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan;
3. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2030; dan
5. RPJMD Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok tahun 2025-2029 dapat menjadi acuan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang selanjutnya dapat dirinci dan dijabarkan pada Rencana Kerja Tahunan.

Arosuka, November 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Solok,

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERHUBUNGAN

MUHAMMAD DJONI, S.STP, M.Si
NIP. 19760102 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-4
1.4 Sistematika Penulisan I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah II-1
2.1.1 Tugas Dan Fungsi dan Sruktur Perangkat Daerah II-1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah II-3
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-8
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah II-10
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah II-11
2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah II-11
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok. II-12
2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis II-17
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN III-1
3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Solok III-1
3.2 Strategi Dan Kebijakan III-3
3.2.1. Strategi Perangkat Daerah III-3
3.2.2 Penahapan Renstra III-4
3.3.2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan III-5
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN IV-1
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan IV-1
4.2 Uraian Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah IV-37
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah IV-40
BAB V PENUTUP V-1
5.1 Kesimpulan V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan V-1
5.3 Pengendalian dan Evaluasi V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Golongan II-3
Tabel 2. 2 ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Jabatan II-4
Tabel 2. 3 ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan II-4
Tabel 2. 4 ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan..... II-5
Tabel 2. 5 ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Jumlah ASN Bidang/Sekretariatan II-5
Tabel 2. 6 ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Jenis Kelamin II-5
Tabel 2. 7 Daftar Inventaris Barang dan Perlengkapan di Dinas Perhubungan II-6
Tabel 2. 8 Rekapan Sumber Daya Dinas Perhubungan Tahun 2025 ..... II-7
Tabel 2. 9 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 ..... II-8
Tabel 2. 10 Pemetaan permasalahan yang terjadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Solok II-13
Tabel 2. 11 Kesesuaian Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra Pemerintah Kabupaten II-15
Tabel 2. 12 Kesesuaian RTRW dengan Renstra Pemerintah Daerah II-17
Tabel 2. 13 Isu Strategis yang terkait dengan Urusan Perhubungan II-19
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Prangkat Daerah III-2
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan..... III-3
Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah..... III-5
Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Perangkat Daerah..... III-5
Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah IV-2
Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah IV-3
Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan IV-14
Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah IV-37
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangakat Daerah..... IV-42
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah..... IV-42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renstra-PD I-2
Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya I-2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pada Dinas Perhubungan II-3

Lampiran I
Peraturan Bupati Solok
Nomor …
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029
Dinas Perhubungan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Solok, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yang merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah , pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam gambar dibawah ini:

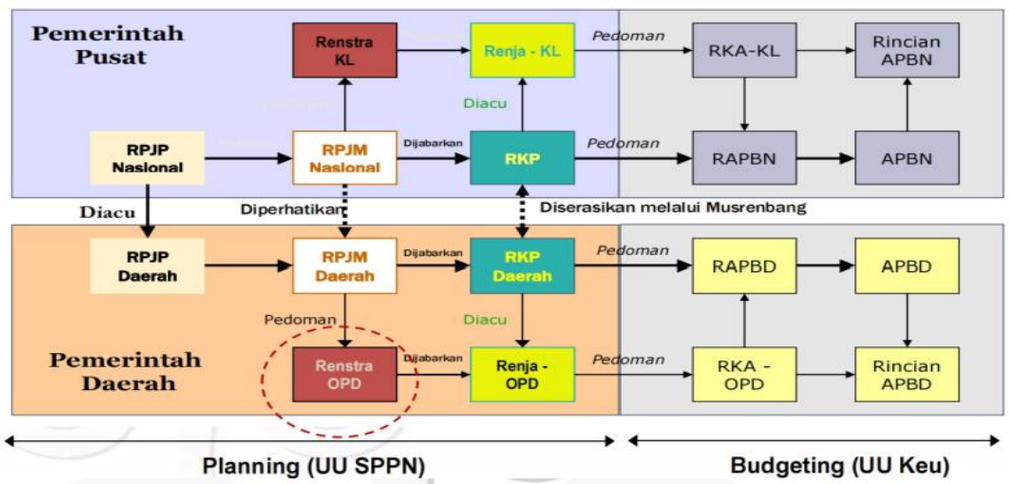
Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renstra-PD



Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Renstra Dinas Perhubungan disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya



Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

5. Undang-undang Nomor 51 tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Undang-undang Nomor 51 tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Perhubungan beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Solok adalah:

a) Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
b) Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Solok secara sistematis dan terorganisir diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
c) Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029, penyusunan rancangan awal Renstra-PD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Subbab 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia, asset/modal, kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta informasi tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Subbab 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaahan

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan untuk masa lima tahun mendatang.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah, pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Dan Fungsi dan Sruktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedududkan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Solok berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Perhubungan sebagaimana fungsinya adalah instansi pelaksana teknis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan. Atas dasar fungsi tersebut maka kinerja Dinas Perhubungan tidak akan terlepas dari penyelenggaraan urusan wajib daerah yakni penyelenggaraan urusan perhubungan. Penjabaran dari fungsinya di atas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
d. Penyelenggaraan kajian / riset tekhnis untuk mendukung tugas di bidang perhubungan;
e. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang ada dan berperan sebagai pengayom masyarakat, Dinas Perhubungan memiliki fungsi pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Solok. Berikut pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap masyarakat dan daerah :

a. Penerbitan dan pengelolaan perizinan operasinal angkutan orang/barang milik masyarakat;
b. Penerbitan dan pengujian kelayakan operasional kendaraan angkutan orang/barang milik masyarakat;
c. Pengaturan dan pengelolaan sarana-prasarana perparkiran, dermaga dan terminal;
d. Pengamanan fasilitas umum dan fasilitas pemerintah terkait dengan berlalu lintas;
e. Pelaksanaan kajian dan rumusan pengembangan manajemen lalu lintas, jaringan transportasi lokal darat, sungai dan danau;
f. Pengamanan setiap acara-acara daerah termasuk acara masyarakat yang dinilai perlu dan harus dilakukan pengamanan;
g. Penerbitan dan pengelolaan perizinan terkait dengan kegiatan usaha tranportasi;
h. Penyediaan fasilitas publik dalam mengakses perizinan secara mudah, cepat dan murah.
i. dan lain – lain

Disamping pelayanan sebagaimana tersebut di atas, banyak pelayanan lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat juga diselenggarakan secara baik dan professional dan tidak kalah pentingnya juga pelayanan internal aparatur sebagai

wujud kepedulian dalam upaya mewujudkan sumberdaya yang optimal dan professional.

Dalam struktur Organisasi Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I. Sekretariat

a) Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
2. penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
3. penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

2. Bidang Lalu Lintas

a) Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang lalu lintas;
2. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait dibidang pengendalian operasional, pembinaan, pengawasan dan rekayasa lalu lintas;
3. pelaksanaan kajian teknis terkait lalu lintas seperti Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
4. perumusan dan permasalahan data yang berkaitan dengan perlengkapan jalan/fasilitas LLAJ; dan
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang lalu lintas.

3. Bidang Angkutan

a) Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang angkutan;
- pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pemberdayaan dengan awak jasa angkutan; dan
- pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan jasa angkutan.

4. Bidang Keselamatan

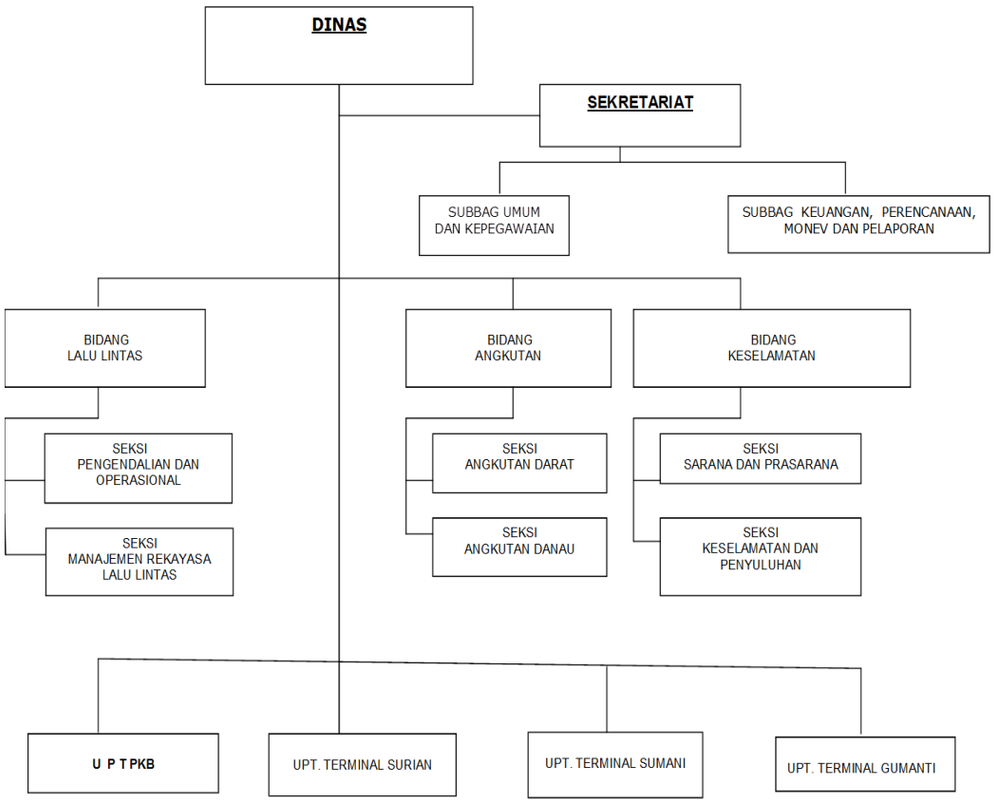
a) Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana dan program di bidang keselamatan;
2. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir, dan lampu penerangan jalan umum;
3. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait bidang keselamatan sarana dan prasarana perhubungan;
4. pelaksanaan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir, dan lampu penerangan jalan umum;
5. pelaksanaan kajian teknis terkait sarana dan prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan

bermotor, dermaga, gedung parkir, dan lampu penerangan jalan umum
6. pelaksanaan audit keselamatan dan analisis kecelakaan; dan
7. pemberian penyuluhan keselamatan transportasi.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pada Dinas Perhubungan



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Solok, 2025

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Personil Dan Tata Laksana Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

a) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Golongan

. Berdasarkan Golongan ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terbagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagaimana data pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1 ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH	%
1	GOL I	1	3
2	GOL II	17	39
3	GOL III	20	45
4	GOL IV	6	13
TOTAL		**44**	**100**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Solok, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.1 diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Solok didominasi oleh Golongan 3 yang berjumlah 20 orang dari jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok. Sedangkan golongan terkecil adalah

golongan 1 yang berjumlah 1 Orang dari jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

b) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Jabatan

Berdasarkan jabatan ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terbagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagaimana data pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2. 2 ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Jabatan

NO	BERDASARKAN ESSELON	JUMLAH	%
1	ESELON II	1	3
2	ESELON III	4	9
3	ESELON IV	13	29
4	STAF	26	59
TOTAL		**44**	**100**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Solok, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.2 diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Solok didominasi oleh Staf yang berjumlah 26 orang dari jumlah 44 Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

c) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Berdasarkan jabatan ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terbagi menjadi 5 (Lima) kelompok sebagaimana data pada table 2.3 berikut:

Tabel 2. 3 ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S.2	5
2	S.1/D.4	14
3	D.3	3
4	D.2/D.1/SLTA	21
5	SLTP/SD	1
TOTAL		**44**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Solok, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.3 diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Solok didominasi oleh Tingkat pendidikan D.2/D.1/SLTA yang berjumlah 21 orang dari jumlah ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

d) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan

Berdasarkan tingkat pendidikan penjenjangan ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terbagi menjadi 4 (Empat) kelompok sebagaimana data pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2. 4 ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	DIKLAT PIM I	-	
2	DIKLAT PIM II	1	7,6
3	DIKLAT PIM III	1	7,6
4	DIKLAT PIM IV	11	84,6
TOTAL		**13**	**100**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Solok, 2025

Data pada table 2.4 berikut menggambarkan bahwa ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 13 orang. Pendidikan penjenjangan dengan jumlah terbanyak adalah Diklatpim IV dengan yang berjumlah 11 orang atau 84,6%.

e) **Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan masing-masing bidang**

Berdasarkan masing-masing bidang ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terbagi menjadi 6 (Enam) kelompok sebagaimana data pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2. 5 ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Jumlah ASN Bidang/Sekretariatan

No	BIDANG / SEKRETARIAT	JUMLAH	%
1	Sekretariat	15	34
2	Bidang Keselamatan	4	9
3	Bidang Lalu Lintas	7	16
4	Bidang Angkutan	6	14
5	UPTD Terminal	5	12
6	UPTD PKB	7	15
TOTAL		**44**	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Solok, 2025

Data pada Tabel 2.5 berikut menggambarkan bahwa ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok untuk masing-masing bidang dengan jumlah terbanyak pada Sekretariat dengan yang berjumlah 15 (orang) orang atau 34%.

f) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. 6 ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Jenis Kelamin

No	BIDANG / SEKRETARIAT	JUMLAH	%
1	Laki-laki	32	73
2	Perempuan	12	27
TOTAL		**44**	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Solok, 2025

Data pada Tabel 2.6 berikut menggambarkan bahwa ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dengan jenis kelamin paling banyak adalah laki-laki dengan total 73%.

B. Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan

a) Terminal dan Dermaga

Di Kabupaten Solok belum terdapat terminal tipe A, B namun sudah terdapat terminal tipe C yang terdapat di Sumani, Alahan Panjang, dan Surian namun saat ini belum bisa berfungsi secaara optimal.

Selain terminal penumpang untuk mobil penumpang umum di Kabupaten Solok juga terdapat dermaga penyebrangan untuk angkutan danau dan penyeberangan. DiKabupaten Solok terdapat 2 dermaga yang aktifkan kembali yaitu Dermaga Singkarak dan Dermaga Danau Diatas

b) Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok terdapat prasana pengujian kendaraan bermotor dengan luas gedung uji sebesar 240 m^2 dan luas gedung administrasi sebesar 36 $m^{2.}$.

c) Daftar Inventaris Barang dan Perlengkapan :

Daftar inventaris yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan baik dikantor maupun dilapangan terdapat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8

Tabel 2. 7 Daftar Inventaris Barang dan Perlengkapan di Dinas Perhubungan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
A	**Alat-alat kendaraan**				
1	Mini bus	4	4	-	-
2	Kapal Motor	2	2	-	-
3	Pic Up	6	5	-	1
4	Kendaraan roda dua	9	7	-	2
5	Bus	1	1	-	-
B.	**Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga**				
1.	Papan Nama Instansi	1	1	-	2
2.	Lemari Kayu	11	11	-	
3.	Kursi Rapat	60	31	-	29
4.	Kursi Tamu	3	3	-	-
5.	Kursi Putar	5	5	-	-
6.	Meja Komputer	4	4	-	-
7.	Kipas Angin	8	7	-	1
8.	Televisi	2	1	-	1
9.	Saund System	2	2	-	4
10	Wireles	1	1	-	-
11	Kursi Kerja Pegawai	10	10	-	-
12.	Meja Pejabat Eselon	10	9	-	1
13.	Meja Kerja Pegawai	15	15	-	-
14.	Komputer PC	36	14	-	12
15.	Laptop	8	8	-	-
16.	Printer	8	5	-	3
17.	Tablet PC	-	4	-	-
18.	Camera Digital	-	1	-	-
19.	CCTV	-	4	-	-
20.	Layar Film	-	1	-	-
21.	Handy Talky	19	8	-	11

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
22.	AC	2	-	-	2
23.	Mesin Ketik Portabel	3	-	-	3
24.	Papan Nama	3	-	-	3
25.	Scaner	1	-	-	1
26.	Facsimile	1	-	-	1
27.	Alat Pengujian Kendaraan	9	9	-	-
C.	**Alat Kelengkapan Jalan**				
1.	Rambu Jalan	209	159	-	50
2.	Traffic Light	4	4	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Solok, 2025

Tabel 2. 8 Rekapan Sumber Daya Dinas Perhubungan Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH	KEKUATAN	KELEMAHAN
1	**Sumber Daya**			
	ESELON 2 ESELON 2I ESELON IV STAF	1 4 13 26	• Beberapa Pegawai sudah mengikuti Diklat Perhubungan	• Masih kurang nya Pegawai yang mengikuti diklat perhubungan (lalu lintas, angkutan, keselamatam, pengujian, Andalalin, dll) • Masih kurangnya pegawai yang sarjana maupun magister
	DIKLAT PIM I DIKLAT PIM 2 DIKLAT PIM 2I DIKLAT PIM IV	- 1 1 11		
	S.2 S.1/D.4 D.3 D.2/D.1/SLTA SLTP/SD	5 14 3 21 1		
	GOL I GOL 2 GOL 2I GOL IV	1 17 20 6		
	Laki-laki Perempuan	32 12		
	Sekretariat Bidang Keselamatan Bidang Lalu Lintas Bidang Angkutan UPTD Terminal UPTD PKB	15 4 7 6 5 7		
2	**Aset**			
	Alat-alat kendaraan			
	Mini bus Kapal Motor Pic Up Kendaraan roda dua Bus	1 2 6 9 1	-	Masih Kurangnya kendaraan operasional Kendaraan
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga			
	Papan Nama Instansi Lemari Kayu Kursi Rapat Kursi Tamu Kursi Putar Meja Komputer Kipas Angin	1 11 60 3 5 4 8	Terakomodirnya kegiatan harian dan administrasi dengan perlengkapan kantor yang tersedia	Tidak semua pegawai mendapatkan fasilitas sehingga pemakaian fasilitas alat-alat kantor

NO	URAIAN	JUMLAH	KEKUATAN	KELEMAHAN
	Televisi Saund System Wireles Kursi Kerja Pegawai Meja Pejabat Eselon Meja Kerja Pegawai Komputer PC Laptop Printer Tablet PC Camera Digital CCTV Layar Film Handy Talky AC Mesin Ketik Portabel Papan Nama Scaner Facsimile Alat Pengujian Kendaraan	2 2 1 10 10 15 36 8 8 - - - - 19 2 3 3 1 1 9		
	Alat Kelengkapan Jalan			
	Rambu Jalan Traffic Light	209 4	-	Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan untuk cakupan wilayah Kabupaten Solok yang luas

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Solok, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan sebagaimana fungsinya adalah instansi pelaksana tekhnis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan. Atas dasar fungsi tersebut maka kinerja Dinas Perhubungan tidak akan terlepas dari penyelenggaraan urusan perhubungan. Penjabaran dari fungsinya di atas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan beberapa fungsi jabaran yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan.

Analisis Kinerja atas Urusan Bidang Perhubungan di Kabupaten Solok dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2. 9 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konektivitas darat	0,27	0,53	0,89	0,81	0,81
2	Kinerja Lalu Lintas (Rasio)	0,20	0,5	0,56	0,33	0,24
3	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	117	50	99	94	87
4	Rasio Izin Trayek	0,54	0,44	0,89	0,81	0,81
5	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	861.120	782.151	851.875	663.591	656.884
6	Jumlah terminal bis/dermaga	5	5	5	6	6
7	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Solok, Tahun 2025

Rasio konektivitas kabupaten tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang tetap karena rendahnya tingkat perpindahan masyarakat menggunakan

angkutan umum. Faktor lain yang mempengaruhi adalah banyak wilayah yang tidak terlayani angkutan dari trayek yang ada sehingga memicu tingginya pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi.

Pengukuran kinerja lalu lintas berdasarkan pada Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI,2014). Dimana pengukuran kinerja lalu lintas yang dilakukan terbagi atas pengukuran kinerja ruas jalan, yaitu kemampuan ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas sesuai dengan fungsinya yang dapat diukur dan dibandingkan dengan standar tingkat pelayanan jalan.

Kinerja lalu lintas dikelompokkan menjadi 6 yaitu tingkat pelayanan A, B, C, D, E, dan F. Kabupaten Solok berada pada tingkat pelayanan B (0,20-0,44) sama dengan tahun sebelumnya, dengan karakteristik 1. Arus Stabil dengan volume lalu lintas sedang 2. Kecepatan Perjalanan Rata-Rata Turun s/d ≥ 70 km/jam 3. Kepadatan lalu lintas rendah.

Tingkat pelayanan jalan berpengaruh pada tingkat kecepatan dan waktu tempuh, semakin rendah angka ratio maka semakin tinggi *Level of service* jalan tersebut sehingga keadaan lalu lintas semakin lancar. Sebaliknya jika angka rasio semakin tinggi maka arus semakin lamban dan volume kendaraan di jalan tersebut padat. Pemerintah Kabupaten Solok melakukan banyak kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, termasuk perbaikan infrastruktur jalan kabupaten. Perbaikan infrastruktur jalan kabupaten dilakukan di sejumlah titik yang mengalami kerusakan yang sangat parah. Perbaikan pada infrastruktur jalan ini memberi dampak terhadap kelancaran arus lalu lintas pada sejumlah ruas jalan di Kabupaten Solok sehingga hal tersebut juga meningkatkan *level of service* atau tingkat pelayanan jalan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Solok melakukan pengamanan lalu lintas pada jam sibuk dan pada saat acara-acara keramaian.

Data angka kecelakaan dari kepolisian menunjukkan total kecelakaan pada tahun 2024 sejumlah 87 kejadian. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 94 kejadian. Penurunan angka kecelakaan di Kabupaten Solok tidak lepas dari atensi berbagai pihak dan stakeholder yang saling berkoordinasi. Seluruh pihak terkait berusaha di berbagai aspek untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan di jalan raya. Pada indikator ini Dinas Perhubungan menjalin kerjasama dengan Kementerian Perhubungan melalui BPTD kelas II Sumatera Barat untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas. Pada tahun 2023 telah terpasang rambu dan marka jalan sejumlah 123 rambu. Selain itu Dinas Perhubungan juga meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan melalui kegiatan PAM pengamanan lalu lintas yang dilakukan pada jam sibuk setiap harinya guna memantau dan membantu pengguna jalan dalam kelancaran berlalu lintas.

Pada indikator jumlah orang/barang yang diangkut oleh angkutan umum pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dari pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 656.884 orang/barang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tingginya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi.

Pada tahun 2023 terjadi penambahan jumlah terminal bis/dermaga dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 6 (enam) yang terdiri dari 4 terminal bis dan 2 dermaga dan tahun 2024 tidak ada

penambahan. Penambahan pengelolaan terminal pada Terminal Taratak Galundi yang berada di Alahan Panjang. Pada tahun sebelumnya terminal tersebut belum difungsikan sebagaimana mestinya dikarenakan belum terkelola oleh pemerintah daerah. Namun tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Solok telah melakukan serah terima Terminal Taratak Galundi dari Pemerintah Kabupaten Solok untuk dikelola dan difungsikan sebagaimana mestinya.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum pengertian kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan termasuk dinas pelayanan, sehingga tugas utamanya adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terdiri dari :

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan.

Jaringan pelayanan angkutan jalan yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah pelayanan dalam hal penyediaan jaringan/trayek angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan. Namun hanya sedikit jaringan jalan yang telah terlayani trayek angkutan umum. Permasalahan trayek di Kabupaten Solok memang merupakan dilema,pertumbuhan serta perkembangan kawasan permukiman tidak diimbangi dengan pertumbuhan angkutan umum penumpang sehingga potensi angkutan illegal sangat terbuka.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan.

Pelayanan dasar jaringan prasarana angkutan jalan merupakan pelayanan dalam penyediaan prasarana dasar berupa terminal, dermaga dan halte dengan fasilitas yang layak yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa.

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan.

Pelayanan Dasar penyediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan guardrill serta kelengkapan lainnya berupa zebra cross, traffic light, Warning Light dan Penerangan Jalan Umum.

d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Untuk memenuhi standar laik jalan angkutan umum orang dan barang, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan secara intensif melakukan peningkatan proses Uji KIR Kendaraan Bermotor yang dilakakukan dan dikelola oleh Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.

e. Parkir

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Adapun jenis pelayanan parkir terdiri dari:

1) Parkir Umum
2) Parkir Khusus
3) Parkir Insidentil

Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok meliputi:

1) Penyelenggaraan Lahan Parkir
2) Penataan dan pengaturan parkir tepi jalan dan parkir berlangganan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Mitra Dinas Perhubungan (Dishub) sangat beragam, meliputi instansi pemerintahan, BUMN, swasta, dan institusi pendidikan. Ruang lingkup kemitraannya mencakup berbagai sektor transportasi, mulai dari darat, laut, hingga udara. Berikut adalah beberapa mitra Dishub:

1. Lembaga Pemerintahan
   a) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Menjalin kerja sama dalam penegakan hukum lalu lintas dan pengaturan jalan.
   b) Kementerian/Lembaga terkait: Berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan (terutama dalam pertukaran data) dan Kementerian PUPR (terkait infrastruktur).
   c) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ): Bekerja sama dalam mengembangkan transportasi terintegrasi di wilayah Jabodetabek.

2. BUMN dan Swasta
   a) PT Kereta Api Indonesia (KAI): Menjalin kerja sama dalam pengembangan perkeretaapian dan transportasi terintegrasi.
   b) PT Angkasa Pura: Berkolaborasi dalam pengelolaan dan pengembangan bandara.
   c) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo): Bekerja sama dalam pengembangan pelabuhan.
   d) Operator transportasi umum: Bermitra dengan berbagai perusahaan swasta dalam penyediaan layanan angkutan darat, laut, dan udara.

3. Lembaga Pendidikan
   a) Institusi pendidikan tinggi: Bekerja sama dengan perguruan tinggi, seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), untuk pengembangan sumber daya manusia dan penelitian di bidang transportasi.
   b) Sekolah kedinasan Kemenhub: Berkolaborasi dengan sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan, seperti Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD), dalam pengembangan pendidikan transportasi.

4. Organisasi dan Komunitas
   a) Asosiasi pengusaha: Membangun kemitraan dengan berbagai asosiasi, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
   b) Komunitas masyarakat: Berkolaborasi dengan komunitas, seperti komunitas pecinta kereta api, untuk mengkampanyekan keselamatan lalu lintas.

2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu kritis/strategis yang dimaksudkan disini adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu

kritikal yang mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan yang dihadapi oleh Sektor Perhubungan di Kabupaten Solok atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap kinerja Sektor Perhubungan Kabupaten Solok. Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok sebagai berikut :

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

Kabupaten Solok selain mempunyai potensi untuk pengembangan transportasi darat, juga memiliki potensi untuk pengembangan transportasi danau. Keduanya masih belum mengalami perkembangan yang cukup baik. Semakin berkurangnya moda angkutan darat menandakan belum terkoordinasinya sarana ini secara baik. Dan belum optimalnya pemanfaatan moda angkutan danau menandakan belum tergalinya potensi danau secara optimal untuk mendukung aktivitas masyarakat disekitar danau.

Selain moda angkutan, sarana transportasi darat yang sangat berperan dalam menjaga keselamatan lalu lintas adalah Penerangan jalan Umum (PJU) dan marka jalan. Kedua sarana ini belum merata ditemukan di wilayah Kabupaten Solok, sampai saat ini juga belum didapatkan angka kebutuhan PJU dan marka jalan terhadap panjang jalan yang ada.

Sektor perhubungan saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peranan masyarakat sangat besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, namun pelayanan tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di bidang transportasi. Hal ini berjalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintah yang modern, bahwa setiap peranan pemerintah harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat sehingga dapat mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan handal. Adapun indentifikasi permasalahan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Prasarana jalan yang kurang memadai;
2. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan.
3. Kondisi geografis yang bergunung-gunung sehingga sistem transportasi tidak efektif dan efisien;
4. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas;
5. Belum adanya aturan/acuan tentang penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas yang baik, Sistem pelaporan, analisis kecelakaan serta penanggulangannya baik menyangkut sarana, prasarana maupun manusia;
6. Kemacetan lalu lintas di pasar tumpah dan tanah longsor.
7. Sumber daya manusia perhubungan yang masih terbatas

Terdapat beberapa perubahan isu-isu permasalahan yang dituangkan di dalam renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemetaan permasalahan yang terjadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 2.10 dibawah ini:

Tabel 2. 10 Pemetaan permasalahan yang terjadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

No	MASALAH POKOK	MASALAHAN	AKAR MASALAH
1.	Kurangnya fasilitas keselamatan transportasi dan konektivitas antar wilayah.	Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas	Banyaknya titik rawan kecelakaan lalu lintas
			Belum optimalnya database transportasi
			Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas
			Masih kurangnya fasilitas pendukung keselamatan dan keamanan transportasi
		Belum optimalnya pelayanan angkutan umum	Rasio konektivitas angkutan umum yang masih rendah
			Penurunan pengguna angkutan umum
			belum optimalnya peran serta forum Lalin

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Solok, 2025

Berdasarkan Tabel 2.10 yang berisi tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah pada sektor Transportasi memiliki permasalahan yaitu Belum Optimalnya Layanan Transportasi untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat sehingga Aksesibilitas dan Konektifitas antar wilayah rendah.

A. Telaah Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dishub Provinsi Sumatera Barat

Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahap keempat Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 difokuskan pada 4 aspek, meliputi Konektivitas Poros Maritim, Konektivitas Multimoda, Keselamatan

Transportasi, dan Transportasi Perkotaan. Visi Kementerian Perhubungan adalah ***"Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045".***

Transportasi maju merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden 2025 – 2029 dalam RPJMN 2025 – 2029 (Perpres 12/2025) yakni "Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Transportasi maju artinya tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern,handal,inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan **Indonesia Emas 2045** merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka Panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024)

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka ditetapkan misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industry transportasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan ketahanan iklim

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera tahun 2025-2029. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk urusan perhubungan adalah ***"Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau"***

Untuk mewujudkan visi dan tujuan sebagimana tersebut diatas, maka cara–cara yang akan ditempuh atau misi pembangunan perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban bidang Transportasi
2. Meningkatkan kinerja Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi
3. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi yang handal
4. Mengembangkan sistem Jaringan Transportasi yang terintegrasi dalam Mewujudkan Konektifitas Antar Wilayah
5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Bidang Perhubungan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja

Kesesuaian Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra Pemerintah Kabupaten dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2. 11 Kesesuaian Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra Pemerintah Kabupaten

No.	Renstra KL dan Renstra Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Renstra Kementrian Perhubugan dengan Pemerintahan Daerah			
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah	Kurangnya konektivitas antar wilayah baik itu karen kurangnya pelayanan trayek angkutan umum maupun prasarana transportasi	• Kurangnya sarana dan prasarana prasarana pendukung konektivitas transportasi darat dan danau • Jumlah trayek angkutan umum yang tidak mencakup Sebagian besar wilayah kabupaten	• Terus dikembang kannya sarana, prasarana dan pendukung konektivitas ransportasi darat dan danau • Penggaran yang berbasis kebutuhan rakyat untuk pelayanan transportasi
	Renstra Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintahan Kabupaten			
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Belum memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi yang saling terintegrasi	• Belum terpenuhi Kebutuhan dan kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi yang terintegrasi • Belum tepatnya pembangunan infrastruktur transportasi yang saling terintegrasi	• Terus dikembang kannya sarana, prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi yeng terintegrasi • Pembangunan Infrastuktur yang direncanakan dalam Tatanan Transportasi lokal

Sumber : Hasil Analisis, 2025

C. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031, arah rencana pembangunan bidang Perhubungan di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
   a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
   b. jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
2. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jaringan jalan dan jembatan;
   b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;dan
   c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk pembangunan dan pengembangan terminal meliputi:

a. terminal angkutan penumpang yang terdiri atas:
   1. pembangunan dan pengembangan terminal di Arosuka Kecamatan Gunung Talang;
   2. pembangunan dan pengembangan terminal di Sumani Kecamatan X Koto Singkarak;
   3. pembangunan dan pengembangan terminal di Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
   4. pembangunan dan pengembangan terminal di Surian Kecamatan Pantai Cermin;
   5. pembangunan dan pengembangan terminal di Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi; dan
   6. pembangunan dan pengembangan terminal di Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya.
b. terminal angkutan barang di IX Koto Sungai Lasi

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. jaringan trayek angkutan penumpang pulang pergi meliputi:
   1. dari Kota Solok menuju Koto Baru;
   2. dari Kota Solok menuju Pianggu;
   3. dari Kota Solok menuju Sumani-Tembok;
   4. dari Kota Solok menuju Paninggahan;
   5. dari Kota Solok menuju Lubuk Selasih;
   6. dari Kota Solok menuju Muara Panas;
   7. dari Kota Solok menuju Sirukam;
   8. dari Kota Solok menuju Bukit Sileh;
   9. dari Kota Solok menuju Aripan-Tanjung Balit;
   10. dari Kota Solok menuju Terminal Alahan Panjang;
   11. dari Kota Solok menuju Batu Bajanjang;
   12. dari Terminal Alahan Panjang menuju Talang Babungo;
   13. dari Terminal Alahan Panjang menuju Surian;
   14. Rencana pengembangan trayek dari Kota Solok menuju Surian; dan
   15. Rencana pengembangan trayek dari Terminal Bareh Solok menuju Talang Babungo;

b. Jaringan lintas angkutan barang meliputi seluruh wilayah kecamatan.

Jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a). pembangunan dermaga pelabuhan penumpang di Kawasan Danau Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Junjung Sirih.

b). penyediaan kapal perintis penyeberangan danau yang melayani rute-rute yang menghubungkan simpul simpul pusat kegiatan, meliputi:

1. Kabupaten Tanah Datar dengan Kecamatan X Koto Singkarak melalui Danau Singkarak;
2. Paninggahan di Kecamatan Junjung Sirih dengan Sumani di Kecamatan X Koto Singkarak; dan
3. Jorong-jorong di sebelah Barat Danau Diatas dan Danau Dibawah dengan jorong di sebelah Timur danau, yang menghubungkan antara Kecamatan Lembah Gumanti dengan Kecamatan Danau Kembar

c). pembangunan dermaga pelabuhan wisata meliputi:

1. Danau Singkarak di Kecamatan X Koto Singkarak;
2. Danau Diatas di Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Danau Kembar; dan
3. Danau Dibawah di Kecamatan Danau Kembar.

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

a. pengembangan jaringan jalur rel kereta api yang menghubungkan Lintas Teluk Bayur–Padang–Lubuk Alung–Padang Panjang–Solok-Sawahlunto;

b. pembangunan jalur *shortcut* (jalan pintas) Pauh Limo (Padang)–Solok.

Pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak terdapat indikator tujuan pembangunan berkelanjutan untuk Dinas Perhubungan, sehingga tidak ada isu strategis terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Tabel 2. 12 Kesesuaian RTRW dengan Renstra Pemerintah Daerah

No.	Kesesuaian dengan RTRW	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pembangunan Jaringan lalu lintas yang terkoneksi (Terminal angkutan orang, Terminal Barang, Dermaga dan Trayek angkutan	Belum optimalnya konektivitas dan aksesibiltas jaringan transportasi antar wilayah (terminal dan dermaga)	• Angkutan umum yang enggan masuk terminl karen fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai • Kapal yang belum ada sertifikat laik jalan	• Terminal terletak dijalan Nasional dan dilalui banyak trayek angkutan umum • Potensi Wisata danau kabupaten solok yang kian meningkat

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, 2025

2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan bidang perhubungan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang perhubungan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Provinai Sumatera Barat ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan Kab/Kota, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 13 Isu Strategis yang terkait dengan Urusan Perhubungan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Konektivitas Angkutan Umum	1. Kesenjangan aksesibilitas membatasi akses masyarakat ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar, sehingga memperparah kesenjangan sosial 2. Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi erujung pada peningkatan kemacetan, polusi udara, dan konsumsi energi yang lebih tinggi 3. Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK)	1. Kesenjangan ekonomi, Wilayah dengan konektivitas yang buruk cenderung tertinggal secara ekonomi karena terhambatnya pergerakan barang, jasa, dan modal. 2. Urbanisasi yang tidak merata: Kurangnya konektivitas dapat memicu perpindahan penduduk ke kota-kota besar secara tidak terkendali, yang kemudian menimbulkan masalah kepadatan dan kemacetan di wilayah perkotaan	kurangnya integrasi antar moda transportasi, belum meratanya infrastruktur, aksesibilitas yang sulit ke titik transit, serta kurangnya minat masyarakat karena berbagai faktor termasuk biaya dan kenyamanan	Konektivitas dan kapasitas tranportasi antar wilayah melalui transportasi darat dan perairan Efektivitas perpindahan moda angkutan yang belum optimal	Kurangnya konektivitas antar wilayah baik itu karen kurangnya pelayanan trayek angkutan umum maupun prasarana transportasi
	Keselamatan Lalu Lintas	1. Pembangunan prasarana transportasi yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan 2. Kurangnya infrastruktur jalan yang memadai atau konektivitas yang buruk antarwilayah dapat menurunkan mobilitas penduduk 3. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien 4. Prasarana transportasi yang dibangun tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan dapat menjadi rentan terhadap bencana	1. Tingginya biaya logistik: Distribusi barang menjadi lebih mahal dan memakan waktu lebih lama di wilayah dengan infrastruktur yang buruk, yang pada akhirnya membebani konsumen dan pelaku bisnis 2. Kerusakan lingkungan: Pembangunan infrastruktur transportasi yang tidak terencana dengan baik bisa menyebabkan kerusakan ekosistem alam, seperti deforestasi atau fragmentasi habitat	Keselamatan dan Efisiensi Operasional. Diperlukan peningkatan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan transportasi, termasuk komitmen, pengorganisasian, manajemen risiko, dan pemeliharaan kendaraan, untuk mengurangi kecelakaan.	Lokasi, kondisi, dan kelengkapan fasilitas terminal penumpang dan barang serta dermaga danau Integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan antarmoda transportasi Fasilitas dan perlengkapan jalan dalam mendukung MRLL	Belum memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi yang saling terintegrasi

Sumber : Hasil Analisis, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Solok

Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dalam merumuskan tujuan harus bersikap SMART, yaitu specific, measurable, action-oriented, realistic, dan timely, atau spesifik/khusus, bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistis, serta ada jelas penentuan waktu. Tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Solok disusun untuk lima tahun mendatang (2025-2029) yang ditujukan untuk mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas kependudukan, meningkatnya kualitas lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat, melestarikan nilai-nilai agama, adat dan budaya serta meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Solok yang menyangkut pembinaan teknis dan operasional bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Solok mengacu pada visi Bupati Solok yakni **"Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera".**

Misi adalah suatu pernyataan yang harus dilaksanakan dari suatu Organisasi agar dapat terlaksana dengan lebih baik, sebagai tonggak dari suatu perencanaan strategis yang harus diikuti dengan tujuan, adapaun Misi Bupati Solok yang terkait dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yaitu Misi 4: **"Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari".**

Dinas Perhubungan Kabupaten Solok termasuk dalam Tujuan Bupati Solok Nomor 1 yaitu : **"Meningkatkan perekonomian masyarakat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis potensi lokal".**

Tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yaitu Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau dengan sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan dan Meningkatnya Pelayanan angkutan yang terintegrasi

Renstra yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok mengacu pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Mewujudkan pelayanan umum transportasi yang tertib, lancar, aman dan terjangkau sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Solok merumuskan Tujuan dan Sasaran pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Prangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE-LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan											
Meningkatnya pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal	Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau		Rasio konektivitas Kabupaten (Rasio)	0,21	0,23	0,25	0,27	0,30	0,33	0,35	
		Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)	86,45	87,55	88,75	89,95	91,15	92,25	93,45	
		Meningkatnya Pelayanan angkutan yang terintegrasi	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota (Rasio)	0.60: 0.63	0.63: 0.66	0.66: 0.69	0.69: 0.72	0.72: 0.75	0.75: 0.78	0.78:0.80	
		Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan	Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan (Persentase)	80	82,5	85	87,5	88	90,5	93	

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, 2025

3.2 Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan menunjukkan bagaimana cara Dinas Perhubungan mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Perhubungan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Penetapan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan, diharapkan dapat menjadi arahan dan pedoman serta dorongan bagi setiap aktivitas ASN Dinas Perhubungan, sehingga dapat membentuk satu kesatuan gerak dan langkah bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.

3.2.1. Strategi Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, dirumuskanlah strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berikut Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan :

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi **: "Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera"**			
Misi 4 **: "Meningkatkan perekonomian masyarakat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis potensi lokal"**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan	• Pembuatan tatanan transportasi lokal (Tatralok) kabuapten • Kelengkapan marka dan rambu jalan. • Peningkatan kelengkapan lampu penerangan jalan umum (LPJU) • Peningkatan fasilitas keselamatan transportasi • Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu litas pada daerah rawan kecelakaan

Visi **: "Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera"**			
Misi 4 **: "Meningkatkan perekonomian masyarakat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis potensi lokal"**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			• Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perizinan serta standar pelayanan • Membangun kesadaran masyarakat dan penegakan hukum tertib berlalu lintas
		Pengembangan pelayanan publik dalam bidang transportasi	• Peningkatan pelayanan perizinan angkutan • Perumusan aturan dan penataan lokasi parkir Perpakiran • Peningkatan jumlah titik PAM • Pengawalan dan Pengamanan Even khusus • Pengaturan lalulintas saat bencana alam
	Meningkatnya Pelayanan Angkutan yang Terintegrasi	Penguatan kelembagaan dan standar pelayanan angkutan umum	• Pengembangan jaringan pelayanan angkutan • Membangun konektivitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,objek wisata dan simpul transportasi • Penyusunan regulasi penguatan kelembagaan dalam pengelolaan trasnportasi sesuai dengan kewenangan • Pemenuhan standar pelayanan minimal • Penataan sistem perijinan transportasi • Perbaikan sarana dan prasarana terminal tipe C • Perbaikan sarana dan prasarana Dermaga

Sumber : Hasil Analisis Tim Renstra Dishub 2025-2029 Kabupaten Solok

Tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa adanya relevansi antara visi misi Kepala Daerah periode berjalan dengan dukungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam membantu mewujudkan visi misi tersebut. Dimana sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Solok adalah meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas serta neningkatkan konektivitas angkutan antar wilayah yang teriegrasi dengan sektor unggulan.

3.2.2 Penahapan Renstra

Dalam rangka penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran

perangkat daerah diperlukan penahapan pembangunan per tahun. Penahapan pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.3 :

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan terutama di kawasan perkotaan dan perbatasan	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan terutama di kawasan perkotaan dan perbatasan	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan terutama di kawasan perkotaan dan perbatasan	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan terutama di kawasan perkotaan dan perbatasan	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan terutama di kawasan perkotaan dan perbatasan
Pemenuhan bangunan pelengkap jalan terutama di wilayah perkotaan	Pemenuhan bangunan pelengkap jalan terutama di wilayah perkotaan	Pemenuhan bangunan pelengkap jalan terutama di wilayah perkotaan	Pemenuhan bangunan pelengkap jalan terutama di wilayah perkotaan	Pemenuhan bangunan pelengkap jalan terutama di wilayah perkotaan
Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana jalan untuk mendukung keselamatan lalu lintas	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana jalan untuk mendukung keselamatan lalu lintas	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana jalan untuk mendukung keselamatan lalu lintas	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana jalan untuk mendukung keselamatan lalu lintas	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana jalan untuk mendukung keselamatan lalu lintas

Sumber : Hasil Analisis Tim Renstra Dishub 2025-2029 Kabupaten Solok

3.3.2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang dirumuskan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Pemenuhan infrastruktur jalan yang berkualitas, aman dan mendukung konektivitas wilayah serta pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat	1. Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan terutama di kawasan perkotaan dan perbatasan 2. Pemenuhan bangunan pelengkap jalan terutama di wilayah perkotaan 3. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana jalan untuk mendukung keselamatan lalu lintas	

Sumber : Hasil Analisis Tim Renstra Dishub 2025-2029 Kabupaten Solok

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Dinas Perhubungan perlu menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terstruktur dan terukur. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sementara itu, sub kegiatan adalah bagian yang lebih spesifik dari kegiatan tersebut.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian dari masing-masing misi pembangunan Kepala Daerah. Oleh karena itu, perlu dilengkapi dengan indikator capaian yang terukur dan kerangka pendanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel 4.1 sampai 4.3 berikut:

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					7.865.470.951,00		9.761.462.830,00		9.773.650.016,00		9.786.082.099,00		9.798.654.279,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.389.370.951,00		6.971.452.830,00		6.524.967.016,00		6.565.844.459,00		6.940.681.779,00	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan	Indeks Kepuasan Aparatur (Indeks (Skala 0-100))	80	82,5	85	6.389.370.951,00	87,5	6.971.452.830,00	88	6.524.967.016,00	90,5	6.565.844.459,00	93	6.940.681.779,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.416.600.000,00		2.776.010.000,00		3.228.183.000,00		3.195.237.640,00		2.825.972.500,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0,21	0,23	0,25	1.416.600.000,00	0,27	2.776.010.000,00	0,3	3.228.183.000,00	0,33	3.195.237.640,00	0,35	2.825.972.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi	44,1	44,3	45,5		46,7		47,9		49,2		51,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Ideal (Persentase													
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					59.500.000,00		14.000.000,00		20.500.000,00		25.000.000,00		32.000.000,00	
meningkatnya kualitas layanan transportasi danau	Konektivitas Danau (Rasio)	0,4	0,5	0,6	59.500.000,00	0,7	14.000.000,00	0,8	20.500.000,00	0,9	25.000.000,00	1	32.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
TOTAL KESELURUHAN					7865470951.00		9761462830.00		9773650016.00		9786082099.00		9798654279.00	

Sumber : *Dinas Perhubungam, 2025*

Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan							
- Meningkatnya pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal	Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau				Rasio konektivitas Kabupaten (Rasio)		
		Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan			Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas layanan		Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			transportasi darat			DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Tersedianya dan Terpeleliharanya perlengkapan jalan pada ruas jalan Kabupaten	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Terkelolanya Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Terselenggaranya Penerbitan Izin dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Kendaraan Laik Jalan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
				Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	
					Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
				Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.12.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.12.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api				
		Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan			Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)		
			Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan		Indeks Kepuasan Aparatur (Indeks (Skala 0-100))	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.15.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			meningkatnya kualitas layanan transportasi danau		Konektivitas Danau (Rasio)	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.03.2.03 - Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.03.2.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)	2.15.03.2.13.0006 - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	
					Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	2.15.03.2.13.0007 - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	

Sumber : *Dinas Perhubungam, 2025*

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				7.865.470.951,00		9.761.462.830,00		9.773.650.016,00		9.786.082.099,00		9.798.654.279,00		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.389.370.951,00		6.971.452.830,00		6.524.967.016,00		6.565.844.459,00		6.940.681.779,00		
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan	Indeks Kepuasan Aparatur (Indeks (Skala 0-100))	80	85	6.389.370.951,00	87,5	6.971.452.830,00	88	6.524.967.016,00	90,5	6.565.844.459,00	93	6.940.681.779,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				156.000.000,00		167.000.000,00		178.000.000,00		189.000.000,00		201.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	2	156.000.000,00	2	167.000.000,00	2	178.000.000,00	2	189.000.000,00	2	201.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00	2	22.000.000,00	2	23.000.000,00	2	25.000.000,00		
2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				17.000.000,00		19.000.000,00		21.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	3	17.000.000,00	3	19.000.000,00	3	21.000.000,00	3	23.000.000,00	3	25.000.000,00		
2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		28.000.000,00		31.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	21.000.000,00	2	23.000.000,00	2	25.000.000,00	2	28.000.000,00	2	31.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	2	100.000.000,00	2	105.000.000,00	2	110.000.000,00	2	115.000.000,00	2	120.000.000,00		
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.571.580.951,00		4.687.348.830,00		4.812.807.016,00		4.933.294.459,00		5.063.696.779,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	4.571.580.951,00	18	4.687.348.830,00	18	4.812.807.016,00	18	4.933.294.459,00	18	5.063.696.779,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	70		70		72		72		73			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.491.910.951,00		4.601.748.830,00		4.722.367.016,00		4.836.944.459,00		4.959.196.779,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	70	4.491.910.951,00	70	4.601.748.830,00	72	4.722.367.016,00	72	4.836.944.459,00	73	4.959.196.779,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				68.670.000,00		73.600.000,00		76.940.000,00		81.350.000,00		87.500.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	68.670.000,00	12	73.600.000,00	12	76.940.000,00	12	81.350.000,00	12	87.500.000,00		
2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				11.000.000,00		12.000.000,00		13.500.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	11.000.000,00	18	12.000.000,00	18	13.500.000,00	18	15.000.000,00	18	17.000.000,00		
2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.500.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00		
2.15.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan				3.000.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.500.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00		
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				88.000.000,00		90.000.000,00		93.000.000,00		96.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	85	88	88.000.000,00	90	90.000.000,00	93	93.000.000,00	96	96.000.000,00	100	100.000.000,00		
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				88.000.000,00		90.000.000,00		93.000.000,00		96.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	85	88	88.000.000,00	90	90.000.000,00	93	93.000.000,00	96	96.000.000,00	100	100.000.000,00		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				395.300.000,00		447.240.000,00		560.200.000,00		477.400.000,00		488.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	395.300.000,00	2	447.240.000,00	2	560.200.000,00	2	477.400.000,00	2	488.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		6		4		4			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Konsultasi SKPD (Laporan)													
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.300.000,00		5.300.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	5.300.000,00	2	5.300.000,00	2	6.400.000,00	2	6.400.000,00	2	7.000.000,00		
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000,00		52.340.000,00		140.000.000,00		42.600.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	35.000.000,00	4	52.340.000,00	6	140.000.000,00	4	42.600.000,00	4	45.000.000,00		
2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.300.000,00		13.600.000,00		14.800.000,00		16.100.000,00		17.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	11.300.000,00	2	13.600.000,00	2	14.800.000,00	2	16.100.000,00	2	17.000.000,00		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang				10.000.000,00		12.500.000,00		14.000.000,00		15.600.000,00		17.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	10.000.000,00	4	12.500.000,00	4	14.000.000,00	4	15.600.000,00	4	17.000.000,00		
2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000,00		37.000.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00		42.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	35.000.000,00	12	37.000.000,00	12	39.000.000,00	12	40.000.000,00	12	42.000.000,00		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				298.700.000,00		326.500.000,00		346.000.000,00		356.700.000,00		360.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	298.700.000,00	12	326.500.000,00	12	346.000.000,00	12	356.700.000,00	12	360.000.000,00		
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80.000.000,00		838.000.000,00		104.000.000,00		60.000.000,00		225.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	80.000.000,00	1	838.000.000,00	0	104.000.000,00	0	60.000.000,00	1	225.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	0		1		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Disediakan (Unit)													
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	15		18		42		25		61			
2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		650.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	650.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000,00		40.000.000,00		0,00		0,00		50.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00		
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				40.000.000,00		48.000.000,00		104.000.000,00		60.000.000,00		175.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	15	40.000.000,00	18	48.000.000,00	42	104.000.000,00	25	60.000.000,00	61	175.000.000,00		
2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				381.000.000,00		392.000.000,00		403.000.000,00		414.000.000,00		425.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pemerintahan Daerah														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	381.000.000,00	12	392.000.000,00	12	403.000.000,00	12	414.000.000,00	12	425.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	21.000.000,00	12	22.000.000,00	12	23.000.000,00	12	24.000.000,00	12	25.000.000,00		
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				360.000.000,00		370.000.000,00		380.000.000,00		390.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	360.000.000,00	12	370.000.000,00	12	380.000.000,00	12	390.000.000,00	12	400.000.000,00		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				714.490.000,00		346.864.000,00		370.460.000,00		392.150.000,00		433.985.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	5	5	714.490.000,00	5	346.864.000,00	5	370.460.000,00	5	392.150.000,00	5	433.985.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	10		10		11		11		12			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	15		15		15		16		16			
2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				433.640.000,00		43.210.000,00		44.320.000,00		44.300.000,00		45.120.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	433.640.000,00	1	43.210.000,00	1	44.320.000,00	1	44.300.000,00	1	45.120.000,00		
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				78.450.000,00		80.654.000,00		82.640.000,00		83.650.000,00		83.865.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	10	78.450.000,00	10	80.654.000,00	11	82.640.000,00	11	83.650.000,00	12	83.865.000,00		
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.400.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.200.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	15	2.400.000,00	15	3.000.000,00	15	3.500.000,00	16	4.200.000,00	16	5.000.000,00		
2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	200.000.000,00	5	220.000.000,00	5	240.000.000,00	5	260.000.000,00	5	300.000.000,00		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1.416.600.000,00		2.776.010.000,00		3.228.183.000,00		3.195.237.640,00		2.825.972.500,00		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0,21	0,25	1.416.600.000,00	0,27	2.776.010.000,00	0,3	3.228.183.000,00	0,33	3.195.237.640,00	0,35	2.825.972.500,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	44,1	45,5		46,7		47,9		49,2		51,3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				652.500.000,00		1.668.950.000,00		1.911.830.000,00		1.949.712.000,00		1.511.951.000,00		
Tersedianya dan Terpeleliharanya perlengkapan jalan pada ruas jalan Kabupaten	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	10	15	652.500.000,00	18	1.668.950.000,00	20	1.911.830.000,00	23	1.949.712.000,00	20	1.511.951.000,00		
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	208	230		240		255		270		280			
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				254.300.000,00		878.640.000,00		976.430.000,00		986.432.000,00		796.321.000,00		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	10	15	254.300.000,00	18	878.640.000,00	20	976.430.000,00	23	986.432.000,00	20	796.321.000,00		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				398.200.000,00		790.310.000,00		935.400.000,00		963.280.000,00		715.630.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	208	230	398.200.000,00	240	790.310.000,00	255	935.400.000,00	270	963.280.000,00	280	715.630.000,00		
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				20.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terkelolanya Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	4	4	20.000.000,00	4	15.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				20.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	4	4	20.000.000,00	4	15.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				34.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terselenggaranya Penerbitan Izin dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	34.000.000,00	4	35.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00		
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				34.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	4	4	34.000.000,00	4	35.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)													
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				163.600.000,00		203.560.000,00		231.853.000,00		246.525.640,00		226.521.500,00		
Kendaraan Laik Jalan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.174	2.296	163.600.000,00	2.361	203.560.000,00	2.431	231.853.000,00	2.506	246.525.640,00	2.570	226.521.500,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	4		5		5		6		6			
2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				35.600.000,00		35.000.000,00		40.400.000,00		61.200.000,00		61.200.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	4	35.600.000,00	5	35.000.000,00	5	40.400.000,00	6	61.200.000,00	6	61.200.000,00		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				63.000.000,00		113.560.000,00		126.453.000,00		120.325.640,00		100.321.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.174	2.296	63.000.000,00	2.361	113.560.000,00	2.431	126.453.000,00	2.506	120.325.640,00	2.570	100.321.500,00		
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				65.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	9	9	65.000.000,00	9	55.000.000,00	9	65.000.000,00	9	65.000.000,00	9	65.000.000,00		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				366.500.000,00		502.000.000,00		637.500.000,00		610.500.000,00		671.500.000,00		
Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	4	4	366.500.000,00	4	502.000.000,00	5	637.500.000,00	5	610.500.000,00	5	671.500.000,00		
	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)													
2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				236.000.000,00		300.000.000,00		397.000.000,00		370.000.000,00		431.000.000,00		
Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	236.000.000,00	12	300.000.000,00	12	397.000.000,00	12	370.000.000,00	12	431.000.000,00		
2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				25.500.000,00		17.000.000,00		45.500.000,00		45.500.000,00		45.500.000,00		
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	25.500.000,00	1	17.000.000,00	1	45.500.000,00	1	45.500.000,00	1	45.500.000,00		
2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				105.000.000,00		185.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan	4	4	105.000.000,00	4	185.000.000,00	5	195.000.000,00	5	195.000.000,00	5	195.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)													
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				37.000.000,00		40.000.000,00		43.000.000,00		45.000.000,00		48.000.000,00		
Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	3	4	37.000.000,00	4	40.000.000,00	5	43.000.000,00	5	45.000.000,00	5	48.000.000,00		
	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	0	2		2		2		2		2			
2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin				27.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	0	2	27.000.000,00	2	30.000.000,00	2	32.000.000,00	2	33.000.000,00	2	35.000.000,00		
2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				10.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis	3	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	5	11.000.000,00	5	12.000.000,00	5	13.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Andalalin yang terawasi (Laporan)													
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				0,00		132.000.000,00		132.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0	0,00	2	132.000.000,00	2	132.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		
2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				0,00		132.000.000,00		132.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0	0,00	2	132.000.000,00	2	132.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				108.000.000,00		140.000.000,00		162.000.000,00		174.000.000,00		195.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	7	7	108.000.000,00	8	140.000.000,00	8	162.000.000,00	9	174.000.000,00	10	195.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				8.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		
Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	7	7	100.000.000,00	8	130.000.000,00	8	150.000.000,00	9	160.000.000,00	10	180.000.000,00		
2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000,00		39.500.000,00		45.000.000,00		49.500.000,00		53.000.000,00		
Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	39.500.000,00	1	45.000.000,00	1	49.500.000,00	1	53.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.15.02.2.12.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000,00		22.500.000,00		25.000.000,00		27.500.000,00		30.000.000,00		
Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	20.000.000,00	1	22.500.000,00	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	(Dokumen)													
2.15.02.2.12.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		
Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				59.500.000,00		14.000.000,00		20.500.000,00		25.000.000,00		32.000.000,00		
meningkatnya kualitas layanan transportasi danau	Konektivitas Danau (Rasio)	0,4	0,6	59.500.000,00	0,7	14.000.000,00	0,8	20.500.000,00	0,9	25.000.000,00	1	32.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.03.2.03 - Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha				4.500.000,00		6.000.000,00		8.500.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan	9	13	4.500.000,00	15	6.000.000,00	17	8.500.000,00	19	10.000.000,00	20	12.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)													
2.15.03.2.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				4.500.000,00		6.000.000,00		8.500.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	9	13	4.500.000,00	15	6.000.000,00	17	8.500.000,00	19	10.000.000,00	20	12.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				55.000.000,00		8.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	3	3	55.000.000,00	3	8.000.000,00	3	12.000.000,00	3	15.000.000,00	3	20.000.000,00		
	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)	0	1		0		0		0		0			
2.15.03.2.13.0006 - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)	0	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.03.2.13.0007 - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau				5.000.000,00		8.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	3	3	5.000.000,00	3	8.000.000,00	3	12.000.000,00	3	15.000.000,00	3	20.000.000,00		

Sumber : *Dinas Perhubungam, 2025*

4.2 Uraian Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan.

Sub kegiatan dan kegiatan yang mendukung Program prioritas pembangunan daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
1.	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
			2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
			2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	
			2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			Persetujuan Teknis Andalalin	
			2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
			2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
			2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.12.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.12.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2.	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	meningkatnya kualitas layanan transportasi danau	2.15.03.2.03 - Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	
			2.15.03.2.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.13.0006 - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.13.0007 - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	

Sumber: Dinas Perhubungan 2025

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sedangkan indikator kinerja adalah alat yang berfungsi sebagai pengukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Indikator kinerja utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui indikator kinerja utama Dinas Perhubungan. Indikator kinerja Dinas Perhubungan merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada dibawah ini:

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangakat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan									
2.	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio	0,21	0,23	0,25	0,27	0,30	0,33	0,35	
3.	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	86,45	87,55	88,75	89,95	91,15	92,25	93,45	
4.	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	0.60:0.63	0.63:0.66	0.66:0.69	0.69:0.72	0.72:0.75	0.75:0.78	0.78:0.80	

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Konektivitas darat		0,21	0,23	0,25	0,27	0,3	0,33	0,35	
2	Kinerja Lalu Lintas (Rasio)		0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	
3	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas		87	85	83	81	80	79	78	
4	Rasio Izin Trayek		0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	
5	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan		656.884	657.865	659.134	660.364	661.759	662.742	663.825	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	umum									
6	Jumlah terminal bis/dermaga		6	6	7	7	7	8	8	
7	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal		44,1	44,3	45,5	46,7	47,9	49,2	51,3	

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbang Kabupaten Solok untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bapelitbang Kabupaten Solok. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bapelitbang Kabupaten Solok.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok periode 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Bapelitbang Kabupaten Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perhubungan beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bapelitbang secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Solok, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bapelitbang Kabupaten Solok.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis) adalah prinsip-prinsip atau pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan rencana strategis. Kaidah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra dilakukan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti kaidah pelaksanaan Renstra, organisasi dapat memastikan bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. keselarasan dengan RPJMD: penyusunan dan pelaksanaan Renstra harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. konsistensi dengan Rencana Kerja (Renja): Renstra menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) tahunan, memastikan bahwa program dan kegiatan tahunan sejalan dengan strategi jangka panjang;

c. pengukuran kinerja dan evaluasi: Renstra menetapkan indikator kinerja utama yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Proses ini juga mencakup evaluasi kinerja secara berkala;
d. koordinasi dan sinkronisasi: pelaksanaan Renstra harus melibatkan koordinasi yang baik antar perangkat daerah, unit kerja, dan instansi terkait untuk memastikan sinergi dalam pencapaian tujuan;
e. akuntabilitas dan pelaporan: melaporkan hasil pelaksanaan kinerja Renstra secara berkala menjadi salah satu kaidah penting untuk memberikan akuntabilitas kinerja kepada publik dan pimpinan;
f. pemenuhan prioritas dan anggaran: pelaksanaan Renstra harus memprioritaskan kegiatan yang paling relevan dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan;
g. kepatuhan terhadap peraturan: seluruh tata cara dan pelaksanaan Renstra harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan pemerintah terkait perencanaan pembangunan.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra merupakan proses penting untuk memastikan bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra:

a. memantau progres pelaksanaan Renstra untuk memastikan bahwa target dan sasaran dapat dicapai;
b. mengukur kinerja pelaksanaan Renstra berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
c. menilai efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra;
d. mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra;
e. merumuskan rekomendasi perbaikan untuk periode selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi.

Dengan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra, perangkat daerah dapat:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya;
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renstra;
d. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merumuskan strategi perbaikan.

Arosuka, November 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Solok,



MUHAMMAD DJONI, S.STP, M.Si
NIP. 19760102 199703 1 003